

Jokowi Ingin Vaksinasi Drive Thru Bogor Jadi Percontohan

BOGOR (IM) - Presiden Jokowi juga melihat langsung proses vaksinasi drive thru di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (19/3). Ia meminta pelayanan vaksinasi tanpa turun dari kendaraan itu jadi percontohan.

Saat tiba di lokasi pelayanan vaksinasi Drive Thru yang diperuntukkan bagi warga berusia lanjut (lansia) dan driver/ojek online, Jokowi langsung disambut oleh Menteri Kesehatan (Menkes), Budi Gunadi Sadikin, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil, dan Wali Kota Bogor, Bima Arya.

"Baru saja tadi saya melihat proses vaksinasi yang dimulai dari registrasi kemudian screening di atas kendaraan kemudian pemberian penyuntikan vaksin dan observasi. semuanya berjalan dengan lancar," kata Jokowi di GOR Pajajaran, Kota Bogor, Jumat (19/3).

Jokowi mengapresiasi proses vaksinasi massal di Kota Bogor pusat di dua lokasi, satu di antaranya dengan model drive thru. "Kita harapkan model-model vaksinasi drive thru seperti ini, bisa dilakukan di kota-kota lain. Sehingga akan mempercepat

proses vaksinasi secara nasional karena yang saya kemarin juga misalnya di Kota Makassar, di Kabupaten Tana Toraja semuanya juga bergerak dan hari ini di Kota Bogor juga dilakukan vaksinasi massal secara besar-besaran," tuturnya.

Gubernur Ridwan Kamil merespon, bahwa Jawa Barat sudah beberapa kali melakukan vaksinasi model drive thru. Kata dia, layanan vaksinasi itu dapat membantu percepatan proses vaksinasi.

Tidak hanya model vaksinasi berjalan, rencananya Bogor akan menerapkan vaksinasi di pusat perbelanjaan. Hal itu, sekaligus untuk membangkitkan perekonomian.

"Kalo mengandalkan vaksinasi di pusat kesehatan setelah kami hitung tidak akan cukup waktunya. Makanya mendorong gedung- gedung, kemudian memanfaatkan GOR untuk drive thru termasuk mengarahkan agar mall-mall juga dipakai. Nanti sambil habis vaksin mungkin belanja supaya meningkatkan psikologi unit belanja," tambah Ridwan Kamil. **● pra**

8 | Nusantara

IDN/ANTARA



MAL PELAYANAN PUBLIK SALATIGA Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tjahjo Kumolo (kiri) memberikan piagam penghargaan kepada Wali Kota Salatiga Yuliyanto saat peresmian Mal Pelayanan Publik di Salatiga, Jawa Tengah, Jumat (19/3). Pemerintah Kota Salatiga meresmikan Mal Pelayanan Publik terpadu dengan menyediakan sebanyak 195 jenis layanan dari 21 instansi pemerintah kota, pemerintah provinsi, BUMN, BUMD, dan instansi vertikal yang bertujuan agar lebih mempermudah dan cepat dalam melayani masyarakat.

DPRD Jabar Minta Presiden Hentikan Rencana Impor Beras 1 Juta Ton

Masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton, lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Kebijakan impor beras itu jelas tidak menguntungkan petani lokal. Padahal petani lokal harus mendapat perhatian.

BANDUNG (IM) - Pemerintah berencana mengimpor beras 1 juta ton. Ketua Komisi II DPRD Jawa Barat, Rahmat Hidayat Djati meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk membatalkan rencana impor beras tersebut.

"Ya, masa cadangan beras di dalam negeri masih ratusan ribu ton. Lantas pemerintah mau mengimpor beras lagi. Bahkan, sebaiknya Pak Jokowi segera menghentikan kebijakan impor beras," kata Rahmat dalam keterangannya yang diterima, Jumat (19/3).

Dia juga menilai kebijakan impor beras itu jelas tidak menguntungkan petani lokal.

Padahal petani lokal harus mendapat perhatian.

"Penolakan rencana impor ini agar dapat memberikan ruang supaya harga produksi pertanian lokal menjadi lebih tinggi," ujarnya.

Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini mengatakan petani lokal khususnya di Jabar tidak lama lagi memasuki masa panen raya. Untuk itu kebijakan impor beras menurutnya secara langsung akan menggerus harga beras petani lokal.

"Saya yakin hasil panen para petani kita akan mampu memenuhi kebutuhan stok beras di tanah air. Ya, kita kembali ke swasembada beras lah," ujarnya.

"Saya merasa prihatin, ke depan saya berharap dalam membuat kebijakan agar dapat mempertimbangkan kesejahteraan rakyat, khususnya para petani," sambungnya.

Diberitakan sebelumnya, Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil mengusulkan kepada pemerintah pusat untuk menunda atau membatalkan impor 1 juta ton beras. Mengingat kondisi surplus beras di Jabar yang disusul panen raya pada Maret dan April mendatang.

"Kami ini surplus beras di Jawa barat, dan kedua, sebentar lagi mau panen raya kalau tiba-tiba impor beras, maka bisa kebayang kan harganya kebanting. Petani yang berjuang untuk mencari kesejahteraan jadi hilang, maka kami memberikan usulan agar impor beras ditunda atau ditiadakan, sehubungan dengan surplus panen kita," ujar Ridwan Kamil di Gedung Sate, Kota Bandung, Rabu (17/3).

Menurutnya, hingga April 2021 Jabar memiliki surplus beras hingga 322 ribu ton. Ia pun telah berkomunikasi me-

lalui vidcon kepada gabungan kelompok tani (Gapoktan) di Jawa Barat terkait hal ini. Sejumlah perwakilan Gapoktan curhat mengenai rencana impor tersebut.

"Tadi dari Cirebon curhat, biasa bulog beli 120 ribu ton sampai 13 ribu ton, sekarang menurunkan menjadi 21 ribu ton. Masa sudah beras banyak, impor pula kan begitu. Kalau posisinya krisis beras, saya kira masuk akal ya, tapi ini surplus

di Jabar," ujar pria yang akrab disapa Kang Emil itu.

Jangan sampai, ujar Kang Emil, impor beras malah mengancam kesejahteraan petani yang tengah diangkat derajat dan martabatnya melalui berbagai program yang dirancang Pemprov Jabar. "Maka kami mengusulkan ke pemerintah, agar menunda beras impor, maksimalkan saja produksi Jabar yang melimpah," katanya. **● pur**

UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN KOMODITAS MENJELANG RAMADAN

Pemprov Banten Kerjasama dengan Beberapa Daerah

SERANG (IM) - Pemerintah provinsi (Pemprov) Banten bekerjasama dengan beberapa daerah penghasil komoditi pertanian seperti cabai, bawang merah hingga kedelai.

Pasalnya wilayah Banten belum bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.

Untuk mengantisipasi terjadinya kelangkaan komoditi di pasaran, Pemprov Banten akan bekerjasama dengan daerah seperti Jawa Barat, Jawa Timur hingga Lampung.

Sedangkan untuk kedelai, Pemprov Banten belum bisa melakukan kerjasama dengan daerah lain, sebab pasokan yang ada merupakan barang impor dari luar negeri.

Kepala Dinas (Kadis) Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Banten, Babar Suharto mengakui Provinsi Banten untuk beberapa komoditi belum siap untuk produksi lokal. "Jadi ada beberapa produksi yang perlu kerjasama dengan daerah dan penghasil seperti cabai, bawang merah dan produk kedelai impor," ujarnya, Jumat

(19/3).

Barbar melanjutkan, kenaikan komoditas di atas yang beberapa hari terakhir terjadi merupakan efek dari peralihan musim dan dampak dari fenomena La Nina. "Gejala kenaikan ini merupakan gejala nasional, terjadi di hampir seluruh wilayah, tidak hanya di Banten," ucapnya.

Karena ini gejala kenaikan nasional, lanjut Babar, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Kementerian Perdagangan untuk mengantisipasi terjadinya kenaikan harga-harga barang menjelang Ramadan.

"Nanti ada kebijakan dari kementerian dalam menghadapi Ramadan ini, termasuk persiapan terjadinya kenaikan untuk komoditas gula pasir," ucapnya.

Diakui Babar, untuk memudahkan pengawasan, pihaknya akan melakukan pemantauan secara serentak di beberapa titik pasar tradisional di Banten.

"Sebelum Ramadhan kami akan melaksanakan operasi pasar," ungkapnya. **● pp**

Disdukcapil Tangerang akan Resmikan Mesin Anjungan Dukcapil Mandiri

TANGERANG (IM) - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Tangerang akan meluncurkan mesin Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM).

Hal tersebut diluncurkan untuk mempermudah masyarakat dalam pembuatan data diri.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang, Safrudin mengatakan, mesin ADM terobosan baru dan dalam waktu dekat akan diresmikan.

"Mesin itu akan mempermudah masyarakat dalam pembuatan data diri, seperti KTP, KK, AKTA Lahir, AKTA Kematian, KIA, AKTA Pernikahan dan Cerai, serta perbaikan dokumen," ujarnya dikonfirmasi, Jumat (19/3).

Menurut Safrudin, masyarakat bisa mencetak langsung melalui mesin ADM tersebut, dengan catatan sudah mendaftarkan diri kepada Disdukcapil, baik secara online ataupun offline.

Dijelaskannya, cara pendaftarannya sangat mudah, bisa melalui WhatsApp (WA), Facebook, Instagram, dan Email. Setelah mendaftarkan diri, maka akan diberikan barcode pencetakan.

"Barcode itu bisa dicetak di mesin ADM tersebut. Masyarakat langsung mencetaknya tanpa menunggu waktu lama," tuturnya.

Safrudin melanjutkan, mesin ADM sudah dipasang di Gerai Tangerang Gemilang dan di Kecamatan Teluknaga, namun belum diaktifkan.

"Kemungkinan dalam waktu dekat akan segera diaktifkan dan

diresmikan oleh Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar," sebutnya.

"Saat ini baru ada dua, kami tarok di Gerai Tangerang Gemilang dan di Kecamatan Teluknaga. Setiap mesin ada petugasnya, hal itu agar bisa membantu masyarakat yang belum bisa menggunakan mesin," tandasnya.

Dia menambahkan, pendaftaran pelayanan membuat Kartu Keluarga di nomor 081282372016. Kemudian KTP Elektronik 081212492477.

Selain itu, membuat KIA di nomor 085694012597, surat pindah keluar 081338020399, surat pindah datang 081338020399, akta pernikahan & cerai 082122940299, dan untuk perbaikan data masyarakat bisa menghubungi nomor 085213471120.

Adapun via online lainnya bisa via Facebook Disdukcapil Kabupaten Tangerang (FB), Disdukcapil_Kab_Tangerang (IG), Tangerangkab.go.id/Disdukcapil (Website), dan (Email) Disdukcapil@tangerangkab.go.id.

Sementara itu, Kepala Bidang Administrasi dan Kependudukan, Hedi M Hertadi menambahkan, bahwa terobosan-terobosan ini, yaitu pembuatan data diri secara online sangatlah efektif di masa pandemi ini. Pasalnya, bisa mengurangi kerumunan penduduk. Walaupun terobosan ini dibuat jauh sebelum adanya pandemi Covid-19.

"Pendaftaran secara online ini sudah dibuat sebelum adanya Covid-19. Dan selama ini sangat efektif dimasa pandemi ini," paparnya. **● pp**



IDN/ANTARA

RUMAH TERDAMPAK ANGIN PUTING BELIUNG DI DEPOK

Warga memotong pohon yang menimpa bangunan rumahnya akibat angin puting beliung di Bojongsari, Depok, Jawa Barat, Jumat (19/3). Menurut data Kabid Penanggulangan Bencana Kota Depok, angin puting beliung yang terjadi pada Kamis (18/3) pukul 16.00 WIB tersebut mengakibatkan sebanyak 49 rumah rusak.

SIAPKAN RP49 MILIAR UNTUK PEMBEBASAN LAHAN

Kementerian PUPR Lebarakan Jalan Raya Puncak

CISARUA (IM) - Cisarua - Balai Besar Pembangunan Jalan Nasional (BBPJN) VI Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menganggarkan Rp42 miliar untuk pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor. Ujaya tersebut merupakan bagian dari program kerja eksisting atau pelebaran Jalan Raya Puncak terutama di titik-titik yang lebar jalannya semakin menyempit atau bottle neck.

"Tahun 2021 BBPJN VI Kementerian PUPR menganggarkan Rp49 miliar untuk pembebasan lahan di wilayah Kecamatan Cisarua," kata Kepala BBPJN VI Kementerian PUPR, Hari Suko kemarin.

Dia menerangkan, usai pembebasan lahan itu maka pelaksanaan peningkatan atau pelebaran Jalan Raya Puncak akan dilakukan pada tahun berikutnya.

"Tahun ini hanya pembebasan lahan sepanjang 1 km. Kalau untuk peningkatan atau pelebaran Jalan Raya Puncak itu nanti setelah kami siap secara anggaran dan nilainya juga be-

lum kami tentukan karena masih tergantung besar lahan yang dibebaskan," terangnya.

Dihubungi terpisah, Camat Cisarua, Deni Humaedi menjelaskan pembebasan lahan Jalan Raya Puncak dimulai dari Hotel Cisarua Indah hingga sebelum Kantor KUA Cisarua atau sesudah Hotel Santo Jaya.

Dia melanjutkan, setelah sosialisasi tersebut BBPJN Kementerian PUPR akan mematok lahan yang akan dibebaskan, verifikasi kepemilikan lahan dan berujung ke pembayaran.

"Yang terpenting sosialisasi dahulu dan mendapatkan persetujuan masyarakat, secara umum kami mendukung pelebaran Jalan Raya Puncak dari saat ini dititik tersebut hanya bisa dilalui dua lajur menjadi empat lajur nantinya. Permasalahan bottle neck ini hasil evaluasi setelah gagalnya program kanalisasi 2-1 yang sebelumnya dilaksanakan oleh Pemkab Bogor, Polres Bogor BPTJ (Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek) Kementerian Perhubungan," lanjutnya. **● pur**

Jalan Rusak di Ciapus Bogor Dijadikan Kolam Lele

CIBINONG (IM) - Warga Tamansari, Ciapus, Kabupaten Bogor mengunggah video jalan rusak yang dijadikan kolam ikan lele, Jumat (19/3). Jalan rusak itu sudah empat tahun tidak diperbaiki. Video dan foto itu sekarang viral di media sosial.

Aksi masyarakat itu merupakan bentuk protes masyarakat terkait keberadaan jalan rusak yang sudah menahun tidak diperbaiki. Dalam video berdurasi sekitar dua menit, tampak para warga tengah berada di tengah jalan rusak. Ada yang membawa pancing, membakar ban, dan beberapa anak-anak menangkap ikan lele.

Kubangan itu berada di jalan Tamansari, Ciapus di dekat Jembatan Cihayang. Jalan rusak sudah digenangi air setinggi mata kaki dengan luas sekitar 100 meter persegi.

Ketua Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) Indonesia, Azas Tigor Nainggolan, menuturkan, jalan rusak sudah empat tahun lalu, tetapi tidak juga diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor. "Masyarakat melakukan protes dengan membakar ban dan beberapa anak-anak menangkap ikan lele besar-besaran ditaruh di kolam jalan raya," kata Tigor.

Rusak Parah

Kata dia, banyak jalan raya di Ciapus yang rusak parah sehingga mirip kolam ikan saat musim hujan. Keadaan ini sudah bertahun-tahun dibiarkan, dan tidak diperbaiki oleh Pemerintah Kabupaten Bogor.

Padahal, Jalan Raya Ciapus itu adalah jalan utama bagi warga yang tinggal di Kecamatan Ciapus.

Ketua Karang Taruna Desa Sukajaya, Asep, menyebut, jalan rusak ini sangat mengganggu aktivitas warga. Bukan hanya warga setempat, tetapi warga luar Tamansari juga sangat terganggu lantaran akses jalan juga merupakan jalur wisata.

"Selain itu banyak juga warga yang kecelakaan, terjatuh," paparnya.

Warga yang menaman lele, lanjut Asep, menyebut sebagai aksi spontanitas warga yang dimulai sejak Jumat pagi.

Ketua RT 05/06 Sofian meminta Pemerintah Kabupaten Bogor segera memperbaiki jalan rusak tersebut. Ia meminta Dinas PUPR memperbaiki jalan, yang tiap musim penghujan menjadi kubangan dan musim kemarau berlumpur. **● grio**



IDN/ANTARA/Aji Styawan/foc

PELUNCURAN PROGRAM TOKO MBAKITA BERSAMA BNI

Wakil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu (tengah) bersama Wakil Direktur Utama BNI Adi Sulistyowati (kedua kanan), Direktur Hubungan Kelembagaan BNI Sis Apik Wijayanti (kiri), dan Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang Mustohar (kanan) meninjau salah satu stan batik binaan Pemko Semarang sekaligus nasabah BNI yang telah menembus pasar internasional pada acara UKM Semarang Go Global Bersama BNI dan peluncuran Program E-Commerce Toko MbakITA di Semarang, Jawa Tengah, Jumat, (19/3). BNI siap mendukung pelaku UKM Kota Semarang yang telah bergabung dalam e-commerce Toko MbakITA agar Go Digital dan Go International guna dapat berkembang serta bersaing di pasar nasional maupun internasional.